

indoktrinasi yang dilakukan Jepang terhadap orang Burma mampu membangkitkan semangat orang Burma untuk mengalahkan pemerintah kolonial Inggris. Orang Burma menganggap bahwa mereka harus bisa menjadi pengatur atau pemerintah di negara mereka sendiri, dan bukan diatur oleh orang kulit putih. Bagi orang Burma itu sendiri, Jepang dianggap sebagai saudara penyelamat yang akan membebaskan Burma dari kolonialisme Inggris.

### **BAB III**

#### **Terbentuknya *Anti-Fascist People's Freedom League***

##### **III.1 Pemerintahan Sementara Menjelang “Kemerdekaan” Burma**

Jepang berhasil menduduki Burma dengan bantuan BIA pada bulan Maret 1942 setelah mengalahkan Inggris. Sesuai propaganda dan janji Jepang, maka Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Burma. Sebelum kemerdekaan diberikan, *Japanese 15<sup>th</sup> Division* yang bertindak sebagai badan resmi pemerintahan Jepang membentuk pemerintahan sementara di Burma.<sup>112</sup> Pemerintahan sementara atau yang disebut *Baho Government* dibentuk oleh Kolonel Suzuki pada tanggal 7 Maret 1942<sup>113</sup> dan dikepalai oleh Thakin Tun Oke.<sup>114</sup> *Baho Government* berfungsi sebagai pemerintahan peralihan yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan,

---

<sup>112</sup> John F. Cady. 1960. *A History of Modern Burma*. New York: Cornell University Press. hlm.442

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm.442.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm.442.

mengawasi keadaan dan kondisi di Burma pasca perang.<sup>115</sup> *Baho Government* bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang stabil dan kondusif menjelang pemberian kemerdekaan yang diberikan Jepang.

Sementara itu, setelah pembentukan *Baho Government* yang bertujuan untuk mengendalikan situasi pasca perang, BIA justru melakukan tindakan yang represif terhadap etnis Karen di Distrik Myaungmya.<sup>116</sup> Tindakan yang mereka lakukan di antaranya merampas harta benda, menculik tokoh-tokoh etnis Karen, bahkan membunuh etnis Karen.<sup>117</sup> Hal tersebut mereka lakukan karena BIA mencurigai etnis Karen sebagai aliansi pro-Inggris dan karena etnis Karen tidak bersedia menerima status legal dalam komite pengaturan negara. Selain itu, etnis Karen yang kebanyakan adalah pemeluk agama Kristen, dinilai membahayakan struktur masyarakat Burma yang mayoritas adalah pemeluk agama Budha Theravada. Oleh karena itu, BIA berusaha melenyapkan tokoh agama Kristen Karen, salah satunya yaitu menembak Saw San Po Thin, seorang pemimpin Kristen Karen.<sup>118</sup>

Tindakan represif yang dilakukan BIA menimbulkan permusuhan yang mendalam pada etnis Karen. Permusuhan menyebar sampai ke luar daerah Myaungmya.<sup>119</sup> Permusuhan ini yang kemudian menimbulkan peperangan antara BIA dan etnis Karen yang berlangsung sampai pertengahan Juni 1942.<sup>120</sup> Kondisi

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm.442.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm.443.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm.443.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm.443.

<sup>119</sup> Shelby Tucker. *Ibid.*, hlm.43.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm.44.

yang demikian membuat Jepang khawatir akan kestabilan keadaan dalam negeri Burma. Akhirnya, Jepang mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan permusuhan tersebut. Jepang membubarkan BIA pada tanggal 24 Juli 1942.<sup>121</sup> Sebagai pengganti BIA, Jepang membentuk *Burma Defense Army* pada tanggal 26 Agustus 1942 yang dipimpin oleh Aung San.

Akibat dari tindakan BIA terhadap etnis Karen, *Baho Government* dianggap tidak dapat mengendalikan situasi di Burma dengan baik. Oleh karena itu, *Japanese 15<sup>th</sup> Division* membubarkan *Baho Government* dan pada tanggal 1 Agustus 1942.<sup>122</sup> Jepang kemudian membentuk *Burma Executive Administration* (BEA) sebagai pengganti *Baho Government*.<sup>123</sup> Dalam struktur kepengurusan BEA, Dr. Ba Maw dilantik sebagai pemimpin BEA, Dr. Thein Maung sebagai menteri keuangan, Bandoola U Sein sebagai menteri pekerjaan umum dan rekonstruksi, U Tun Aung mengurus masalah peradilan, U Ba Win sebagai menteri pendidikan dan kesehatan, Saw Hla Pe sebagai menteri perdagangan, industri, dan informasi.<sup>124</sup> Sedangkan Thakin Tun Oke yang pada *Baho Government* menduduki jabatan sebagai pemimpin, kini dalam BEA hanya menjabat sebagai menteri kehutanan.<sup>125</sup>

Selain mempunyai tugas seperti *Baho Government* –menjalankan administrasi pemerintahan, mengawasi keadaan dan kondisi di Burma pasca perang–, BEA

---

<sup>121</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm.10.

<sup>122</sup> J.M. Pluvier. 1974. *Southeast Asia from Colonialism to Independence*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. hlm.223.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm.23.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm.447.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm.447.

mempunyai tugas tambahan yaitu memfasilitasi pertemuan antara Burma dengan Jepang. Pertemuan yang diadakan bertujuan untuk membicarakan mengenai kemerdekaan yang akan diberikan Jepang kepada Burma. Pertemuan yang diadakan di Tokyo pada tanggal 11 Maret 1943, dihadiri oleh perwakilan dari Burma yang terdiri dari Dr. Ba Maw, Dr. Thein Maung, Thakin Mya, dan Aung San.<sup>126</sup> Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Tojo mengumumkan bahwa kemerdekaan Burma akan diberikan pada tahun 1943. Selain itu Jepang menginginkan adanya pembentukan suatu komite yang akan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Burma. Komite yang dibentuk nantinya beranggotakan orang-orang pemerintahan Burma, namun kinerjanya tetap diawasi oleh Jepang.

Pada tanggal 8 Mei 1943, *Burma Independence Preparatory Committee* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Burma) dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Burma.<sup>127</sup> Anggota-anggota komite ini terdiri dari U Chit Hlaing, U Set, Thakin Kodaw Hmaing, Thakin Nu, U Aye, Dr. San C Po, U Thein Maung, U Mya, U Aye Maung, dan U Tan Pe.<sup>128</sup> Dr. Ba Maw bertindak sebagai ketua dalam *Burma Independence Preparatory Committee*. Komite ini beranggotakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas mengenai kenegaraan. Walaupun begitu, mereka bertugas di bawah pengawasan yang ketat dari Jepang.

Intervensi Jepang cukup besar dalam kinerja dan pengambilan keputusan dalam *Burma Independence Preparatory Committee*. Sebagai contoh Kolonel

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm.453.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm.454.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm.454.

Ishimara yang bertindak sebagai penasehat *Burma Independence Preparatory Committee* membuat garis besar mengenai deklarasi kemerdekaan Burma.<sup>129</sup> Ia juga membuat draft perjanjian persekutuan antara Burma dengan Jepang agar Burma bekerja sama secara penuh dan memberikan bantuan militer pada Jepang untuk keperluan Perang Dunia II.<sup>130</sup> Wewenang tersebut (membuat garis besar mengenai deklarasi kemerdekaan) seharusnya dilakukan oleh anggota-anggota komite namun malah dilakukan oleh orang Jepang, Hal inilah yang menandakan bahwa Jepang berpengaruh besar dalam *Burma Independence Preparatory Committee*.<sup>131</sup>

Pada bulan Juli 1943, Dr. Ba Maw dan Thakin Nu bertolak ke Singapura untuk menemui Perdana Menteri Tojo.<sup>132</sup> Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan mengenai kemerdekaan yang akan diberikan pada bulan Agustus 1943.<sup>133</sup> Susunan kabinet dalam pemerintahan yang baru juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Dalam menyusun kabinet, Jepang memilih orang-orang yang dianggap dapat bekerja sama dengan Jepang dan mempunyai sikap yang anti-Barat. Oleh karena itu, Jepang memilih Dr. Ba Maw<sup>134</sup> sebagai Perdana Menteri Burma. Setelah membicarakan semua hal-hal yang berkaitan dengan deklarasi kemerdekaan, delegasi Burma kembali ke Rangoon untuk mempersiapkan kemerdekaan.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm.454.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm.454.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm.455.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm.454.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm.455.

<sup>134</sup> Dr. Ba Maw meraih gelar Ph.D dari Universitas Bordeaux pada tahun 1924. Setelah kembali ke Rangoon, ia memulai karirnya sebagai pengacara. Jepang memilih Dr. Ba Maw sebagai perdana menteri selain karena kemampuan intelektualnya, juga karena pengalaman birokrasinya pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Lihat *Op.Cit.*, hlm.8.

### III.2 Pemerintahan Dr. Ba Maw pada Masa “Kemerdekaan” Burma 1 Agustus 1943

Pada tanggal 1 Agustus 1943 Burma mendapat kemerdekaan dari Jepang.<sup>135</sup> Alasan Jepang memberikan kemerdekaan pada Burma yaitu untuk mendapatkan simpati dari rakyat Burma dan juga menanggulangi ancaman Inggris yang berada di India –Burma berbatasan langsung dengan India–. Dr. Ba Maw dilantik menjadi Perdana Menteri dengan gelar *Nainggandaw Adipati*.<sup>136</sup> Susunan kabinet terdiri dari Thakin Mya sebagai Wakil Perdana Menteri; U Ba Win sebagai Menteri Dalam Negeri; Thakin Nu sebagai Menteri Luar Negeri; Dr. Thein Maung<sup>137</sup> sebagai Menteri Keuangan; Jenderal Aung San sebagai Menteri Pertahanan; U Thein Maung sebagai Menteri Pengadilan; U Hla Min sebagai Menteri Pendidikan dan Kesehatan; Thakin Than Tun sebagai menteri Pertanian; U Mya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri; Thakin Lay Maung sebagai Menteri Komunikasi dan Irigasi; dan Bandoola U Sein sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial.<sup>138</sup>

Tidak semua anggota Thakin dilibatkan dalam posisi pemerintahan yang baru dibentuk. Thakin Thein Pe dan Thakin Soe yang pro-komunis Rusia tidak bersedia bergabung dalam pemerintahan. Mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Moskow yang menyatakan untuk tidak bekerja sama dalam bentuk apapun dengan

---

<sup>135</sup> *Op.Cit.*,hlm.245.

<sup>136</sup> *Ibid.*,hlm.456.

<sup>137</sup> Tak beberapa setelah pelantikan, Dr. Thein Maung diangkat sebagai duta besar Burma di Tokyo. Jabatan sebagai Menteri Keuangan kemudian digantikan oleh U Set.Lihat *Ibid.*,hlm.456.

<sup>138</sup> *Ibid.*,hlm.457.

fasis Jepang.<sup>139</sup> Oleh karena tidak terlibat dalam pemerintahan, Thakin Soe kemudian membuat suatu gerakan gerilya sebagai perlawanan terhadap Jepang di Delta Karen yang bermarkas di Pyapon.<sup>140</sup>

Setelah 'kemerdekaan', perubahan terjadi dalam bidang kemiliteran Burma. Pada tanggal 16 September 1943, *Burma Defence Army* kembali diganti namanya oleh Jepang menjadi *Burma National Army* (BNA). Aung San yang semula menjadi pemimpin BDA tetap mempunyai kedudukan yang sama dalam BNA. Pergantian nama ini dimaksudkan agar ketentaraan nasional Burma dapat mempertahankan diri dari serangan Sekutu dan dapat membantu Jepang dalam Perang Dunia II. Walaupun ketentaraan Burma secara formal sudah berganti nama, namun kendali dan pengawasan Jepang terhadap BNA semakin ketat. Hal ini karena militer merupakan salah satu pilar utama keamanan dan kestabilan dalam negara Burma.<sup>141</sup> Jika Jepang dapat mengendalikan kemiliteran Burma, maka kestabilan negara pun dapat dipertahankan.<sup>142</sup>

Pada dasarnya struktur pemerintahan yang terdapat pada kabinet Dr. Ba Maw sama dengan struktur pemerintahan pada masa kolonial Inggris. Hanya saja ada perbedaan penting yang ada dalam kabinet Dr. Ba Maw. Pada kabinet Dr. Ba Maw,

---

<sup>139</sup> Doktrin yang mereka gunakan yaitu doktrin komunis garis keras atau Zdanov. Ideologi fasis dan komunis satu sama lain saling bertentangan. Tujuan akhir dari fasis adalah adanya satu golongan, kelas, atau elit yang kedudukannya lebih tinggi diantara yang lain. Fasis menganggap bahwa secara rasial manusia itu tidak sama. Oleh karena itu, kemudian muncullah ras superior dan inferior dimana ras superior adalah ras yang paling unggul dari yang lainnya dan ras tersebut boleh memaksakan keinginannya kepada ras atau golongan yang dianggap inferior. Hal ini berbeda dengan komunis yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan kesetaraan.

<sup>140</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>141</sup> Paul H. Kratoska. *Ibid.* hlm. 18.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Jepang memegang kendali dan mengawasi seluruh hal-hal penting yang berhubungan dengan pemerintahan.<sup>143</sup> Di samping itu, pemerintahan Burma bertanggung jawab kepada *Japan 15<sup>th</sup> Army*.<sup>144</sup> Mereka juga harus berkonsultasi dengan Jepang untuk membuat suatu keputusan menyangkut pemerintahan. Selain itu, Jepang juga melakukan pengawasan terhadap radio dan media massa.<sup>145</sup> Hal tersebut dilakukan agar tidak ada pemberitaan-pemberitaan media yang kontra terhadap Jepang sehingga dikhawatirkan dapat menjatuhkan kredibilitas Jepang. Bahkan *Supreme Court* atau Mahkamah Agung di Burma berada di bawah pengawasan Jepang.

Perubahan lain yang terjadi pada masa pendudukan Jepang adalah kebangkitan terminologi tradisional Burma.<sup>146</sup> Jepang mengizinkan menggunakan terminologi tradisional Burma untuk digunakan dalam penamaan pangkat dalam militer.<sup>147</sup> Hal ini dimaksudkan agar Burma dapat semakin mempercayai Jepang dan yakin bahwa Jepang adalah figur pelindung bagi mereka. Salah satu contoh pemimpin militer Burma menggunakan kata 'Bo' yang artinya kolonel pada nama depan mereka dan kata 'Bogyoke' digunakan sebagai pangkat bagi kepala komandan.<sup>148</sup> Selain itu, penamaan komisi-komisi yang mengurus administrasi birokrasi juga menggunakan terminologi tradisional Burma. Sebagai contoh Komisi

---

<sup>143</sup> *Op.Cit.*, hlm.284.

<sup>144</sup> *Op.Cit.*, hlm.284.

<sup>145</sup> John F. Cady, *Ibid.* hlm.461

<sup>146</sup> *Op.Cit.*, hlm.284.

<sup>147</sup> Hugh Tinker *Ibid.*, hm.8.

<sup>148</sup> Sebagai contoh 'Bogyoke' digunakan sebagai nama depan Aung San menjadi Bogyoke Aung San yang artinya adalah Komandan Aung San. Lihat *Ibid.*, hlm.8.

Daerah disebut *Kayaingwuns*, Komisi Pengawas Ketertiban disebut *Ye Boh Hmee*, dan Kantor Pendapatan (kas daerah) disebut *Akunwun*.<sup>149</sup>

Walaupun Jepang telah memberikan kemerdekaan pada Burma, namun campur tangan atau intervensi Jepang dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan Burma masih cukup terasa. Setiap keputusan yang akan diambil dalam hal pemerintahan, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Jepang.<sup>150</sup> Sebagai contoh, saat Dr. Ba Maw hendak merancang program pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, mengatasi masalah ekonomi dan keuangan, pemerataan distribusi komoditas, dan pemberdayaan sumber alam, ia mengirim delegasi ke Tokyo untuk berkonsultasi dengan Jepang.<sup>151</sup> Dr. Ba Maw mengirim Komisi Pelayanan Umum (*The Public Service Commission*) yang terdiri Dr. Ba Han, U Soe Nyun, dan U Ba Nyein ke Jepang pada bulan Mei 1944.<sup>152</sup> Selain berkunjung ke Jepang, komisi ini juga mengunjungi negara lain yang tergabung dalam *Greater East Asia Co-Prosperity Sphere* yaitu Manchukuo, Filipina, dan Thailand untuk melakukan studi banding mengenai kebijakan ekonomi.<sup>153</sup> Setelah melakukan kunjungan, komisi ini kembali ke Rangoon pada bulan Agustus 1944.<sup>154</sup> Dr. Ba Han menyiapkan laporan hasil kunjungan tersebut kepada Dr. Ba Maw. Hasil laporan tersebut berisi bahwa untuk menjalankan program-program pemerintahan, Burma

---

<sup>149</sup> *Op.Cit.*, hlm.462.

<sup>150</sup> *Op.Cit.*, hlm.463.

<sup>151</sup> *Op.Cit.*, hlm.462.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm.402.

<sup>153</sup> *Op.Cit.*, hlm.462.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm.402.

harus berdiskusi dan berkonsultasi dengan Jepang. Selain itu, Burma juga harus mengadakan kontak langsung negara-negara *Greater East Asia Co-Prosperity Sphere* untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, baik ekonomi maupun sosial.<sup>155</sup>

Akan tetapi, 'kemerdekaan' Burma yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan di Burma menjadi lebih maju justru membuat penderitaan baru bagi rakyat Burma. Kemunduran ekonomi banyak dirasakan oleh rakyat Burma pasca 'kemerdekaan'. Kemunduran ekonomi ini salah satunya disebabkan karena terganggunya saluran perdagangan baik internal maupun eksternal.<sup>156</sup> Faktor internalnya yaitu tentara Jepang mengambil alih semua transportasi sungai dan jalur kereta api, hanya menyisakan sedikit angkutan muatan untuk keperluan sipil.<sup>157</sup> Hal tersebut tentu saja membuat sulit pendistribusian bahan makanan seperti beras, ikan, garam, minyak goreng, dll. Pendistribusian bahan makanan yang lamban tentu saja membuat rakyat sulit untuk memperoleh bahan makanan.<sup>158</sup> Faktor eksternalnya yaitu situasi dan keadaan di luar negeri yang sedang bergejolak dalam Perang Dunia II yang menyebabkan arus barang masuk ke Burma menjadi tidak lancar.

### **III.3 Pembentukan *Anti-Fascist People Freedom League***

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm.462.

<sup>156</sup> Paul H. Kratoska., *Ibid.* hlm.44.

<sup>157</sup> *Op.Cit.* hlm.458.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm.45.

Ketidakmampuan Jepang dalam pendistribusian bahan makanan dan mengimpor barang-barang kebutuhan menyebabkan kesulitan ekonomi pada masyarakat Burma<sup>159</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya, hal tersebut menimbulkan inflasi yang tidak terkontrol. Inflasi juga dipicu oleh kebijakan mata uang yang ditetapkan oleh Jepang.<sup>160</sup> Penderitaan masyarakat Burma bertambah karena adanya wabah penyakit seperti malaria, cacar, kolera, dan penyakit pes yang merebak di masyarakat.<sup>161</sup> Penderitaan juga dialami oleh para petani yang banyak kehilangan hewan ternak mereka yang berharga karena diambil paksa oleh tentara Jepang. Hewan ternak ini dipergunakan sebagai bahan makanan oleh tentara Jepang. Selain diambil paksa oleh tentara Jepang, hewan ternak mereka juga banyak yang mati karena epidemik *rinderpest*.<sup>162</sup>

Dalam bidang ekonomi, pemerintah pendudukan Jepang menjalankan sistem autarki (berusaha sendiri) mencukupi kebutuhan setempat tanpa bantuan dari luar. Semua kemampuan di bidang ekonomi harus dipusatkan untuk menunjang perang (*War Economy*). Para petani harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri untuk tetap bertahan (*self sufficiency*), dan mengusahakan hasil pertanian untuk kepentingan perang. Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam Burma. Produksi bahan makanan seperti beras untuk memasok persediaan makanan bagi pasukan militer diberi prioritas tinggi. Hal inilah yang menambah kesengsaraan bagi

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm.45.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm.284.

<sup>161</sup> John Bastin. *Ibid.*, hlm.163.

<sup>162</sup> *Op.Cit.* hlm.,163.

rakyat Burma. Di satu sisi, mereka harus dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri, namun disisi lain hasil pertanian harus diserahkan kepada Jepang untuk memenuhi kebutuhan Jepang.

Tindakan dan perbuatan tentara Jepang terhadap agama Budha juga menimbulkan penderitaan dan kebencian masyarakat Burma terhadap Jepang. Hal ini disebabkan oleh perbuatan tentara Jepang yang tidak menghargai dan menghormati agama Budha. Tentara Jepang menggunakan bangunan suci Budha, *pongyi kyaung* (biara) sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus.<sup>163</sup> Altar biara mereka gunakan sebagai tempat mengeringkan pakaian. Bahkan terkadang tempat tersebut mereka gunakan sebagai tempat pembantaian.<sup>164</sup> Tak hanya itu, mereka bahkan berani merusak gambar-gambar Budha dan gulungan kertas yang berkaitan dengan ajaran Budha.<sup>165</sup> Para biksu pun tak luput dari perlakuan kasar tentara Jepang. Mereka dipaksa untuk mengikat dan memberi makan kuda tentara Jepang.<sup>166</sup> Kejadian-kejadian di atas belum pernah terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris.

Hal-hal tersebut di atas tentu saja menimbulkan kecurigaan dari kaum nasionalis di Burma bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang hanya kedok belaka untuk memperdaya Burma. Para nasionalis kemudian merencanakan suatu strategi perlawanan terhadap Jepang. Thakin, kelompok nasionalis yang pada awalnya mendukung Jepang, kemudian berbalik melawan Jepang. Keberanian Thakin

---

<sup>163</sup> John F. Cady. *Ibid.*, hlm.449.

<sup>164</sup> Dr. Sardesai. *Ibid.*, hlm.284.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm.284.

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm.284.

untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu perang antara Jepang dengan Sekutu memperjelas bahwa Jepang hanya memanfaatkan Burma sebagai pendukung Jepang dan untuk keperluan perang Jepang.<sup>167</sup> Faktor yang kedua berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Burma dan juga ekonomi yang salah urus.<sup>168</sup> Hal tersebut membuat rakyat Burma yang pada awalnya simpati dengan Jepang kemudian berbalik menentang Jepang.

Aung San, tokoh Thakin yang juga pemimpin BNA dan Ne Win, seorang komandan BNA mulai membuat persiapan rahasia untuk melawan Jepang. Pada bulan April 1944, Aung San memanggil beberapa orang perwira BNA yaitu Let Ya dan Kyaw Zaw untuk membicarakan saat yang tepat memulai perlawanan terhadap Jepang.<sup>169</sup> Let Ya dan Kyaw Zaw mendesak Aung San untuk segera memulai perlawanan terhadap Jepang. Menanggapi desakan tersebut, Aung San mengatakan bahwa untuk memulai suatu perlawanan perlu persiapan yang matang dan harus dimulai dengan cara yang hati-hati agar hasil yang didapat bisa optimal.<sup>170</sup> Selain itu, perlu ada rencana yang betul-betul dipersiapkan dengan baik untuk membentuk suatu organisasi perlawanan terhadap Jepang.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup> Jepang mengambil paksa harta benda milik rakyat Burma dan mengerahkan militer untuk membantu Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II.. *Ibid.*,284.

<sup>168</sup> *Op.Cit.*,hlm.318.

<sup>169</sup> *Op.Cit.*,hlm.318.

<sup>170</sup> *Op.Cit.*,hlm.318.

<sup>171</sup> *Op.Cit.*,hlm.318

Aung San kemudian menginstruksikan kepada komandan-komandan militer BNA untuk memberikan ceramah dan pengarahan kepada anak buah mereka mengenai situasi yang sedang terjadi. Aung San juga membuat pernyataan yang tegas bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang adalah kedok belaka untuk menarik simpati rakyat Burma. Padahal sebenarnya, Jepang hanya memanfaatkan Burma untuk keperluan ekonomi dan penunjang kebutuhan perang bagi Jepang.<sup>172</sup> Ia juga menekankan bahwa perjuangan yang sesungguhnya untuk mencapai kemerdekaan baru akan dimulai. BNA kemudian menyebarkan selebaran berisi pernyataan Aung San tersebut ke masyarakat secara diam-diam.<sup>173</sup> Mereka menyebarkannya secara hati-hati agar tidak diketahui oleh *Kempetai* (polisi militer Jepang). Di kalangan Thakin sendiri, rencana perjuangan mencapai kemerdekaan pun menjadi topik yang sering diperbincangkan.

Pertemuan antara Aung San dengan anggota BNA dilanjutkan lagi pada pertengahan April 1944. Aung San kembali mengundang perwira-perwira militernya dan juga Than Tun untuk meneruskan rencana perlawanan terhadap Jepang. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan, diantaranya mengenai pembentukan organisasi perlawanan terhadap fasis Jepang. Satu kesepakatan utama yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut yaitu pembentukan *Anti Fascis Organization* (AFO) atau dalam bahasa Burma disebut *Hpethsit Taikhyetyei Pyithu Ahpwechok* yang

---

<sup>172</sup> Aung San Suu Kyi. 1993. *Bebas dari Ketakutan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm.26.

<sup>173</sup> *Op.Cit.*, hlm.318.

bertujuan untuk melawan fasis Jepang.<sup>174</sup> Mereka mengusung perlawanan anti fasis karena mereka menganggap Fasis Jepang adalah suatu ideologi dan sistem yang berbahaya bagi pemerintahan Burma dan menyengsarakan rakyat Burma.<sup>175</sup> Fasis Jepang yang bersifat ultranasionalis telah mendorong Jepang menjadi negara yang ekspansionis di Asia Tenggara.<sup>176</sup> Ekspansi yang dilakukan Jepang bertujuan untuk menguasai Asia Tenggara. Fasis Jepang menggunakan cara apapun untuk dapat menjadi negara atau ras yang superior di Asia Tenggara.<sup>177</sup> Salah satunya yaitu dengan cara melakukan propaganda dan janji kemerdekaan untuk negara-negara Asia Tenggara yang merupakan negara jajahan.

Dalam pertemuan tersebut juga ditetapkan simbol AFO yaitu bendera merah dengan satu bintang putih di tengah-tengah bendera. Warna merah pada bendera AFO bermakna keberanian dan persatuan dari semua umat manusia di Burma. Sedangkan bintang berwarna putih melambangkan kebebasan dan kebudayaan. Simbol AFO yang melambangkan keberanian dan kebebasan diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk berjuang melawan Jepang.

---

<sup>174</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm.13.

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>176</sup> Clive J. Christie. 2001. *Ideology and Revolution in Southeast Asia 1900–1980*. Cornwall: Curzon Press. hlm., 132.

<sup>177</sup> Stanley G. Payne dari University of Wisconsin mengemukakan mengenai keunikan fasisme yang terlihat dari gaya operasi dan organisasinya. Kaum fasis mementingkan struktur estetis dan simbol-simbol koreografi politik. Gerakan fasis selalu berusaha memanfaatkan mobilisasi massa yang selanjutnya akan disokong oleh militerisasi. Meskipun kaum fasis menghendaki adanya masyarakat yang serba egaliter, mereka tetap menganggap perlu adanya suatu elit khusus yang berhak mengatur semua sektor kehidupan dan sepenuhnya berkuasa terhadap masyarakat. Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.175.

Setelah membentuk AFO, Aung San menyadari bahwa pergerakan melawan Jepang bisa berhasil jika memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah persatuan antar kelompok Thakin yang pernah mengalami fragmentasi. Thakin beraliran komunis yang dipimpin oleh Thakin Soe dan Thakin Thein Pe, yang dari awal tidak mau bekerja sama dengan fasis Jepang untuk memperoleh kemerdekaan, kemudian diajak kerjasama oleh Aung San.<sup>178</sup> Aung San kemudian mengadakan kontak dengan Thakin Soe di Delta Irrawaddy.<sup>179</sup> Setelah berhasil mengadakan kontak dengan Thakin Soe, Aung San mulai melakukan pendekatan yang definitif terhadap Thakin Soe dan kelompoknya. Aung San menjelaskan kepada Thakin Soe bahwa ia akan memulai perlawanan terhadap Jepang. Oleh karena itu, ia bermaksud melakukan kerjasama dan mengajak Thakin Soe bergabung bersama Aung San untuk melawan Jepang.

Pada bulan Mei 1944, Aung San mengutus Ne Win dan Letnan Ye Htut bersama dengan pemimpin PRP (*People Revolutionary Party*) seperti U Ba Swe dan U Kyaw Nyein untuk kembali melakukan pertemuan dengan Thakin Soe di markas Dedaya.<sup>180</sup> Aung San mengutus mereka bertemu Thakin Soe untuk membuktikan keseriusan Aung San untuk melawan Jepang. Thakin Soe dan kelompoknya menerima utusan yang dikirim oleh Aung San dan bersedia melakukan pertemuan

---

<sup>178</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm.13.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>180</sup> Alfred W. Mc Cay(ed). 1980. *Southeast Asia Under Japanese Occupation*. Monograph Series No.22/Yale University Southeast Asia Studies.hlm.172.

dengan mereka.<sup>181</sup> Dalam pertemuan tersebut dihasilkan manifesto yang berjudul “Barisan Depan Revolusi” (*The Revolutionary Vanguard*) yang berisi :

The leader of the parties that were formerly known as the Revolutionary Party and Communist Party (Burma) respectively after having had discussions, have agreed to merge the two parties. They have now completed the task.

1. Whereas Communism, far from opposing, but rather supporting, nationalism and independence;
2. And whereas the People’s Revolution Party wholly believes that absolute freedom for Burma can be gained only by following that policy of independence, democracy, and socialism;

The two aforementioned parties will be integrated into a single party with only one policy and program under the name Communist Party (Burma) and will work effectively toward its goal. (Alfred W. McCay, 1980.hlm.172)

Makna dari manifesto tersebut yaitu baik komunis maupun sosialis harus mendukung pergerakan nasionalisme menuju kemerdekaan. Selain itu, kaum komunis dan sosialis harus berintegrasi ke dalam satu organisasi atau partai yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma.<sup>182</sup> Manifesto tersebut juga sebagai pembuktian bahwa Thakin Soe bersedia bekerjasama dengan Aung San untuk melawan Jepang.

Salah satu hal penting lainnya selain mempersatukan antar golongan adalah adanya bantuan dari pihak eksternal.<sup>183</sup> Inggris, yang pada awalnya merupakan penjajah Burma, sekarang berbalik dijadikan sebagai partner untuk melawan Jepang. Aung San meminta bantuan Inggris karena Inggris adalah musuh Jepang dalam PD II. Inggris adalah negara Sekutu yang posisinya paling dekat dengan Burma –pada

---

<sup>181</sup> Ibid.,hlm.172.

<sup>182</sup> Ibid.,hlm.172.

<sup>183</sup> Ibid.,hlm.319.

waktu itu pemerintahan Inggris berada di Simla, India-. Di samping itu, Inggris adalah negara yang paling mengerti mengenai kondisi geografis dan politik Burma.<sup>184</sup> Untuk dapat menghubungi Inggris, Thakin Thein Pe melakukan kontak dengan Inggris di India.<sup>185</sup> Hubungan dengan Inggris bertujuan untuk mendapatkan bantuan militer guna memperkuat ketentaraan Burma.<sup>186</sup> Inggris memberikan respon yang positif terhadap Burma. Inggris bersedia membantu Burma untuk melawan Jepang karena Jepang adalah musuh Inggris dalam PD II. Dengan membantu Burma, maka Inggris berharap bisa mengalahkan Jepang dan mengusir Jepang dari wilayah Burma. Inggris juga mendorong kaum nasionalis Burma untuk segera melakukan perlawanan terhadap pemerintahan fasis Jepang di Burma. Sebagai bentuk implementasi kesediaan Inggris membantu Burma, maka dibentuklah *Civil Affairs Service* (Burma) atau dikenal dengan CAS (B) yang dikepalai oleh Admiral Lord Mountbatten.<sup>187</sup>

Setelah berhasil melakukan pendekatan dengan Thakin komunis dan membuat kontak dengan Inggris, rencana selanjutnya adalah melakukan pendekatan terhadap etnis Karen. Pendekatan terhadap etnis Karen bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan juga sebagai upaya rekonsiliasi terhadap etnis Karen pasca peperangan pada tahun 1942. AFO mengirimkan delegasi-delegasinya untuk melakukan rekonsiliasi dengan etnis Karen. AFO berusaha

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm.319.

<sup>185</sup> *Op. Cit.*, hlm.318.

<sup>186</sup> *Op. Cit.*, hlm.318.

<sup>187</sup> Admiral Mountbatten dilahirkan pada tanggal 25 Juni 1900. Ia menjabat sebagai *Supreme Allied Commander for Southeast Asia* dengan masa jabatan 2 tahun (1943-1945). Mountbatten melakukan operasi melawan Jepang di Burma menjelang PD II. Mountbatten juga pernah menjabat sebagai gubernur jenderal India pada tahun 1947-1948, mengatur transisi menjelang kemerdekaan India. *Ibid.*, hlm.172.

meyakinkan etnis Karen bahwa jika Burma merdeka maka etnis Karen akan diberi otonomi dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan dengan etnis-etnis yang lain. Akhirnya, melalui pendekatan yang berkelanjutan, rekonsiliasi dapat tercapai dan terbangun pula saling pengertian antara Karen dengan Burma.<sup>188</sup>

Pengumpulan dukungan kemudian diperluas ke berbagai kelompok dan organisasi. Than Tun melakukan kontak dan konsolidasi ke berbagai kelompok untuk mempersiapkan organisasi perlawanan anti-Jepang. Salah satu kelompok yang dikonsolidasi oleh Than Tun adalah *Burma Revolutionary Party* (BRP).<sup>189</sup> Kelompok ini dipimpin oleh orang-orang sosialis seperti Thakin Mya dan Ba Swe. BRP beranggotakan kaum petani dan buruh. Than Tun menganggap bahwa konsolidasi yang dilakukan terhadap BRP cukup penting karena BRP beranggotakan kaum petani dan buruh yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Burma. Kelompok penting lainnya selain BRP yaitu *All Burma Youth League* (ABYL) yang dipimpin oleh Ba Gyan.<sup>190</sup> ABYL mempunyai 60 cabang yang tersebar ke seluruh pelosok Burma.<sup>191</sup> Dengan adanya cabang yang begitu banyak walaupun dalam skala (keanggotaan) yang kecil, maka akan semakin menguatkan perlawanan mereka terhadap Jepang. Selain itu ABYL juga membantu BNA untuk merekrut anggota-anggota baru AFPFL.<sup>192</sup>

---

<sup>188</sup> *Op.Cit.* hlm.319.

<sup>189</sup> *Op.Cit.* hlm.319.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm.465.

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm.465.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm.319.

Segala aktivitas yang dilakukan untuk membentuk front nasional anti-Jepang dikerjakan secara diam-diam. Namun, lama-kelamaan Dr. Ba Maw mengetahui rencana Aung San untuk membentuk suatu organisasi perlawanan terhadap Jepang. Dr. Ba Maw kecewa karena Aung San tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada dirinya mengenai rencana perlawanan terhadap Jepang.<sup>193</sup> Dr. Ba Maw menilai bahwa rencana perlawanan terhadap Jepang dipimpin dan diorganisir oleh orang-orang yang belum berpengalaman. Dr. Ba Maw kemudian membentuk *Mahabama Party (Greater Burma Party)* pada awal Agustus 1944.<sup>194</sup> Pembentukan *Mahabama Party* bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan dan perhatian rakyat Burma kepada pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut sia-sia karena kebencian terhadap Jepang dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah tidak bisa dibendung.

Jepang juga melakukan tindakan guna menarik kembali simpati rakyat Burma terhadap Jepang. Tindakan yang dilakukan Jepang tidak bersifat represif karena konsentrasi Jepang lebih terfokus dalam PD II.<sup>195</sup> Tindakan represif dikhawatirkan memperumit keadaan di Burma menjelang PD II. Tindakan persuasif yang dilakukan

---

<sup>193</sup> Alasan mengapa Aung San tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dr. Ba Maw mengenai perlawanan terhadap Jepang, karena menganggap bahwa Dr. Ba Maw pro-Jepang. Padahal sebenarnya Dr. Ba Maw tidak terlalu pro-Jepang. Hal ini terbukti dari publikasi *Burma's New Order Plan* pada bulan Juni 1944 oleh Dr. Ba Maw. *Burma's New Order Plan* berisi mengenai 4 point yaitu 1). Jepang harus tidak mencampuri urusan politik Burma, 2).Jepang tidak harus mencampuri urusan pemerintahan Burma, 3). Jepang harus menyetujui adanya pegawai pemerintahan Burma dalam setiap negosiasi dengan Jepang, 4). Urusan ketentaraan dan bisnis harus diatur melalui pemerintahan Burma. John F Cady. *Op.Cit.*, hlm. 429.

<sup>194</sup> *Mahabama Party* merupakan reorganisasi dari *Dobama Sinyetha Party* yang dibentuk pada tahun 1942. *Dobama Sinyetha Party* merupakan gabungan dari Dobama Asiayone, Sinyetha Party (partai yang dibentuk oleh Dr. Ba Maw), dan asosiasi Thakin. Dobama Sinyetha Party menggunakan simbol-simbol tradisional Burma seperti Budha, Dhamma, dan Sangha. Pembentukan *Dobama Sinyetha Party* pada waktu itu bertujuan untuk mengendalikan organisasi dan partai politik agar mendukung Jepang. Lihat *Op.Cit.* hlm. 466.

<sup>195</sup> J.M. Pluvier. *Ibid.*, hlm. 316.

oleh Jepang salah satunya yaitu mengganti Isamura yang dianggap tidak dapat bekerjasama dengan Burma.<sup>196</sup> Isamura digantikan oleh Jenderal Heito Kimura sebagai kepala komandan *Burma Area Army*.<sup>197</sup> Jenderal Heito Kimura menunjukkan sikap yang lebih bersahabat dengan orang-orang di pemerintahan Burma. Ia sering melakukan pertemuan dengan Dr. Ba Maw untuk membicarakan langkah guna mengurangi ketegangan antara Jepang dengan rakyat Burma. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Jepang untuk memperbaiki keadaan ternyata tidak membuahkan hasil. Tindakan yang dilakukan Jepang tidak menyurutkan rencana AFO untuk melawan Jepang.

Pada tanggal 1 Agustus 1944, tepat setahun ‘kemerdekaan’ Burma diperingati, Aung San berpidato di Jubilee Hall, Rangoon, mengenai ‘kemerdekaan’ Burma yang hanya merupakan *puppet government*.<sup>198</sup> Ia membacakan pidato yang berjudul “Bangkitlah dan Serang Kaum Fasis” di hadapan para pendukungnya. Dalam kesempatan tersebut, Aung San menekankan bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk berjuang

---

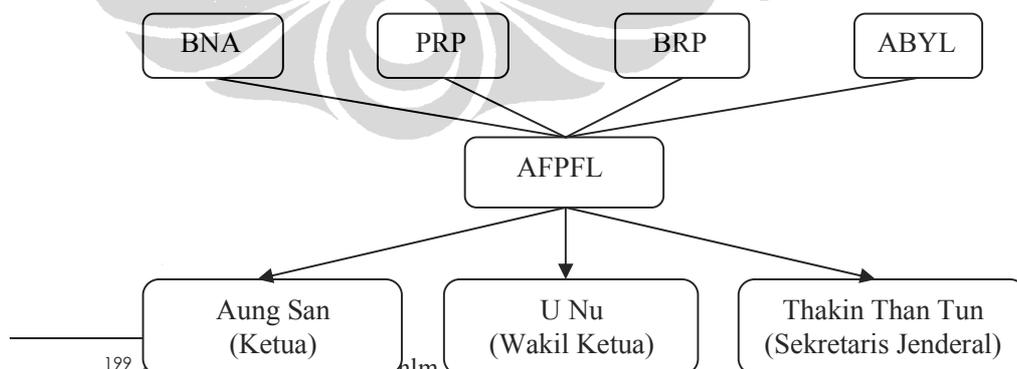
<sup>196</sup> Salah satu peristiwa yang memicu perselisihan Isamura dengan dengan pemerintahan Burma yaitu pada saat Isamura menolak rencana *Dobama Sinyetha Party* untuk mendesain dan pengibarkan bendera Burma yang baru secara resmi. Bendera tersebut berwarna kuning dengan garis hijau horizontal serta terdapat matahari berwarna merah yang sedang bersinar di sudut atas bendera. Sebagai balasan atas tindakan Isamura tersebut, Dr. Ba Maw menolak proposal yang diajukan Isamura mengenai mata pelajaran wajib pada kurikulum sekolah di Burma. Lihat John F. Cady. *Ibid.*, hlm.468.

<sup>197</sup> *Op.Cit.*, hlm.316.

<sup>198</sup> John F. Cady. *Ibid.*, hlm.480.

mencapai kemerdekaan. Pidato yang disampaikan Aung San menandakan permulaan yang formal dalam perjuangan perlawanan terhadap Jepang.<sup>199</sup>

Rencana perlawanan terhadap Jepang pun terus dilakukan setelah Aung San berpidato di Jubilee Hall dan berhasil mendapat dukungan dari berbagai kelompok. Pada tanggal 19 Agustus 1944, Aung San mengadakan pertemuan di Naythuyein, Pegu, bersama dengan anggota PRP (Ba Swe, Kyaw Nyein, dan U Chit); anggota BNA (Ne Win, Let Ya); Thakin Soe, U Nu, Thakin Tein Pe, Thakin Than Tun, dan unsur-unsur kelompok lain yang mendukung perlawanan terhadap Jepang.<sup>200</sup> Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk sebuah organisasi penerus AFO. Mereka kemudian mengganti nama AFO menjadi *Anti-Fascist People Freedom League* (AFPFL) atau dalam bahasa Burma singkatannya disebut *hpa has pa la*.<sup>201</sup> Pergantian nama ini menunjukkan bahwa tujuan mereka tidak hanya melawan fasis Jepang tetapi juga bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma yang sebenarnya.<sup>202</sup> Untuk lebih jelasnya, lihat skema di bawah ini:



<sup>199</sup> ... , hlm. ...

<sup>200</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Ket: BNA (Burma National Army)  
PRP (People's Revolutionary Party)  
BRP (Burma Revolutionary Party)  
ABYL (All Burma Youth League)

Dalam perkembangan selanjutnya, unsur-unsur yang tergabung dalam AFPFL semakin bertambah yaitu dari etnis *frontier area* seperti Karen, Kachin, Shan, golongan biksu, dll.  
(Sumber: D.R Sardesai, 1981. hlm 284. Lihat juga Frank N. Trager, 1966. hlm.64)

Selain perubahan nama dari AFO menjadi AFPFL, dalam pertemuan tersebut juga disepakati struktur kepengurusan dalam AFPFL. Aung San dipilih sebagai ketua AFPFL karena Aung San adalah sosok yang dapat mempersatukan antar golongan. Ia juga mempunyai kapabilitas kepemimpinan yang cakap serta berpengalaman dalam hal strategi.<sup>203</sup> Terpilih sebagai wakil ketua AFPFL adalah U Nu. Ia merupakan figur yang mudah bekerja sama dengan pihak lain dan juga seorang yang berwibawa. Sedangkan Than Tun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dalam AFPFL.<sup>204</sup>

AFPFL mempunyai manifesto yang berjudul "*Drive Away the Fascist Japanese Marauders*"<sup>205</sup> yang berisi rencana perlawanan terhadap Jepang. Selain itu, AFPFL secara diam-diam mempublikasikan dan mengedarkan pamflet yang berisi mengenai "self government" kepada rakyat Burma.<sup>206</sup> Isu mengenai *self government* diangkat karena AFPFL menilai bahwa pemerintahan Dr. Ba Maw merupakan pemerintahan boneka yang mudah dikendalikan oleh Jepang. AFPFL menginginkan pemerintahan yang mandiri yang bebas dari intervensi pihak asing sehingga arti

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>204</sup> Dr.Sardesai., *Ibid.* hlm.285.

<sup>205</sup> Kaum nasionalis menganggap bahwa Jepang adalah perampok atau penjahat yang telah menyengsarakan rakyat Burma. John F. Cady. *Ibid.*, hln.480.

<sup>206</sup> *Op.Cit.*, hlm.285.

kedaulatan sebuah negara dapat terealisasi dengan benar. *Self government* itu sendiri rencananya mempunyai konstitusi yang menjamin kebebasan untuk berpikir, berbicara, pers, berkumpul dan menyatakan pendapat, beragama, serta perlawanan terhadap penangkapan orang –misalnya dalam kasus demonstrasi, aksi-aksi pemogokan– secara ilegal yang tidak melalui proses hukum yang berlaku.<sup>207</sup> Selain itu, AFPFL juga menjanjikan jika kemerdekaan Burma dapat tercapai, maka AFPFL akan menjamin kesejahteraan kaum pekerja, menjalankan reformasi pertanian yang progresif, membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang masih terbelakang secara ekonomi, dan mengembangkan pendidikan yang lebih bermutu.<sup>208</sup> Konstitusi yang dijanjikan oleh AFPFL juga menjamin keamanan dalam negeri dan distribusi bahan makanan, perikanan, dan hasil hutan.

Martin Smith dalam bukunya yang berjudul *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*” menyatakan bahwa berdirinya AFPFL merupakan puncak perjuangan pergerakan nasional di Burma. Hal ini karena AFPFL merupakan satu-satunya organisasi pada masa pergerakan nasional yang berisi banyak unsur masyarakat.<sup>209</sup> Di samping itu, AFPFL merupakan organisasi yang mempunyai massa pendukung paling besar di antara organisasi-organisasi lainnya di Burma.<sup>210</sup>

Terbentuknya AFPFL memberi warna tersendiri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Burma. Hal tersebut dikarenakan AFPFL merupakan organisasi

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, hlm.480.

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm.480.

<sup>209</sup> Martin Smith. *Ibid.*, hlm.61.

<sup>210</sup> *Ibid.*, hlm.61.

pertama di Burma yang mengusung tema perlawanan terhadap Fasis Jepang. Inilah yang membedakan AFPFL dengan organisasi-organisasi yang lain yang terdapat di Burma. Hal tersebut merupakan kekuatan tersendiri bagi AFPFL untuk dapat memperjuangkan dan mendapatkan kemerdekaan Burma yang sebenarnya.



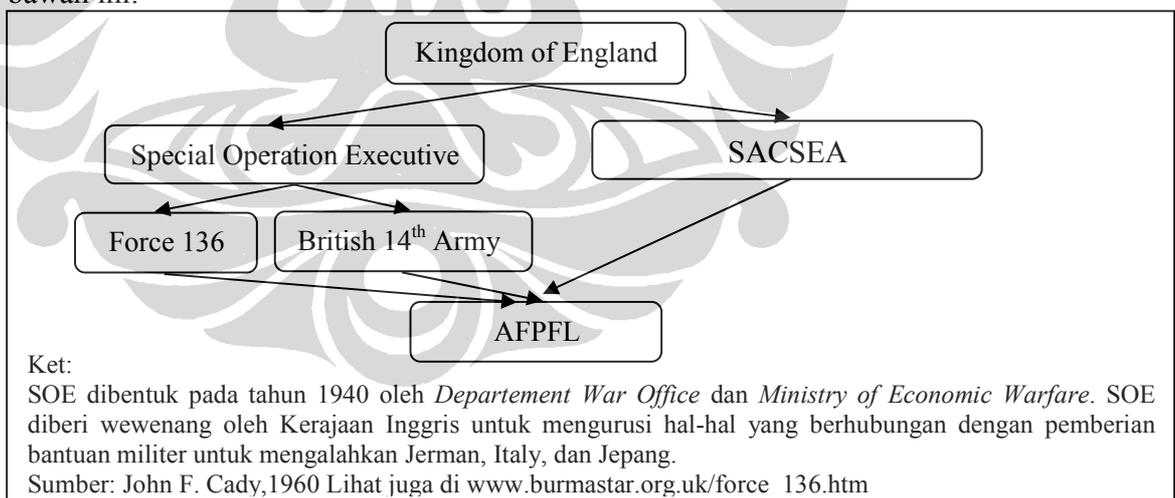
## **Bab IV**

### **Perjuangan AFPFL Mencapai Kemerdekaan Burma**

#### **IV.1 Kekalahan Jepang**

AFPFL berencana untuk mengusir Jepang dari wilayah Burma dengan bantuan Inggris. Inggris bersedia membantu AFPFL karena Inggris berkepentingan untuk mengalahkan Jepang –sebagai musuh Sekutu dalam Perang Dunia II dan seperti diketahui Inggris termasuk ke dalam negara-negara yang tergabung dalam Sekutu–. Pemerintah Inggris yang bermarkas di Simla, India, kemudian mengutus *Supreme Allied Commander for Southeast Asia* (SACSEA) yaitu Admiral Lord Louis

Mountbatten untuk mengurus pemberian bantuan kepada AFPFL.<sup>211</sup> Lord Mountbatten diberi wewenang dalam memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan bantuan administrasi. Selain menugaskan SACSEA di Burma, Inggris juga menugaskan *Special Operation Executive* (SOE) untuk memberikan bantuan militer pada AFPFL. Untuk keperluan bantuan militer, SOE membentuk suatu batalion militer yang diperbantukan di Burma. SOE kemudian membentuk Force 136<sup>212</sup> yang dipimpin oleh John Ritchie Gardi pada tanggal 16 Maret 1944. Tujuan dari didirikannya Force 136 di Burma adalah untuk mengumpulkan informasi penting mengenai pergerakan tentara Jepang dan mengorganisir BNA untuk menghancurkan jaringan komunikasi dan suplai makanan kepunyaan Jepang.<sup>213</sup> Untuk lebih jelasnya, mengenai struktur komando pemberian bantuan kepada AFPFL, lihat skema di bawah ini:



<sup>211</sup> Paul H. Kratoska. *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>212</sup> Force 136 dibentuk di India dan Ceylon dan beroperasi di Burma. Setelah Perang Dunia II berakhir, peran dan kewajiban Force 136 berubah. Force 136 yang semula bertugas mengumpulkan informasi penting mengenai pergerakan Jepang dan mengorganisasi pergerakan kelompok bawah tanah untuk menghancurkan jaringan komunikasi dan dan suplai makanan kepunyaan Jepang kemudian berubah tugas yaitu untuk melepaskan tentara Sekutu yang ditahan Jepang.

<sup>213</sup> John F. Cady. *Ibid.*, hlm. 500.

Sebagai rencana awal, Inggris mengirimkan bantuan militer yang berupa persenjataan dan tentara kepada AFPFL. Pada bulan Februari 1945, Inggris berhasil mengirimkan sekitar 3.000 persenjataan kepada AFPFL.<sup>214</sup>

Setelah pemberian persenjataan terlaksana, hal yang kemudian dilakukan oleh AFPFL dan SOE adalah membuat rencana untuk menyerang tentara Jepang di Burma. Sebagai bentuk implementasi dari rencana tersebut, SOE kemudian mengirim pasukan Force 136 di bawah komando Mayor Jenderal C.F.B. Pearce sebagai tentara bantuan yang akan mendampingi AFPFL dalam melakukan penyerangan terhadap tentara Jepang.<sup>215</sup> Selain Force 136, juga SOE juga mengirim *British 14<sup>th</sup> Army* di bawah komando Jenderal Field-Marshal Slim.<sup>216</sup> Rencana penyerangan dimulai dengan menyerang tentara Jepang yang terdapat di daerah-daerah pinggiran kota Rangoon. Daerah pertama yang diserang yaitu Pegu Yoma.<sup>217</sup> Setelah berhasil menguasai daerah Pegu Yoma, kemudian penyerangan dilanjutkan ke daerah-daerah pinggiran lain seperti Mandalay, Toungoo, dan Yamethin.<sup>218</sup> Setelah daerah-daerah tersebut dikuasai, penyerangan terakhir ditujukan untuk menyerang Jepang di kota

---

<sup>214</sup> Persenjataan tersebut berupa senjata laras panjang, mortir, peluru, mesiu, dan granat. *Ibid.*, hlm.500.

<sup>215</sup> *Ibid.*, hlm.500.

<sup>216</sup> Alfred W. McCay. *Op. Cit.*, hlm.178.

<sup>217</sup> Pegu merupakan kota di sebelah selatan Burma dan merupakan kota kapital di distrik Pegu. Daerah ini menghasilkan kayu jati dan beras. Industri perikanan pun cukup berkembang di daerah ini karena terdapat Sungai Pegu. Di Pegu terdapat jalur kereta api yang menghubungkan Pegu dengan Rangoon. Kereta api inilah yang digunakan tentara Jepang sebagai transportasi menuju Rangoon. Oleh karena itu, daerah ini menjadi sasaran penyerangan AFPFL dan Force 136 dengan tujuan untuk memutus transportasi tentara Jepang ke Burma dan mengamankan sumber daya alamnya dari eksploitasi Jepang. *Ibid.*, hlm.501.

<sup>218</sup> *Ibid.*, hlm.501.

Rangoon. Penyerangan ke kota Rangoon menjadi rencana yang vital karena *Japanese 15<sup>th</sup> Army* terkonsentrasi di Rangoon. Selain itu, di Rangoon terdapat Pelabuhan Rangoon. Pelabuhan ini menjadi saluran yang penting untuk menyuplai makanan dan persenjataan bagi *British 14<sup>th</sup> Army*.<sup>219</sup>

Serangan terhadap tentara Jepang dimulai pada tanggal 25 Maret 1945.<sup>220</sup> *British 14<sup>th</sup> Army* diturunkan di Sittang Valley yang menghadap ke arah Rangoon.<sup>221</sup> Daerah Sittang Valley itu sendiri merupakan area yang strategis untuk melakukan pengintaian dan penyusunan rencana penyerangan terhadap Jepang.<sup>222</sup> Mereka ditempatkan di tempat tersebut untuk melakukan pengintaian terhadap tentara Jepang dan berjaga-jaga terhadap pergerakan tentara Jepang. *British 14<sup>th</sup> Army* kemudian melanjutkan penyerangan terhadap tentara Jepang dari Yamethin ke Pegu yang berjarak sekitar 220 mil.<sup>223</sup> Penyerangan tersebut dilakukan selama 18 hari dimulai dari tanggal 11 April sampai 29 April 1945. Di daerah Toungoo, unsur BNA dalam AFPFL melakukan penyerangan terhadap Jepang dengan bantuan Force 136.<sup>224</sup> Di Pyinmana, BNA juga melakukan penyerangan terhadap tentara Jepang. Serangan-serangan yang dilakukan oleh AFPFL, *British 14<sup>th</sup> Army*, dan Force 136 bertujuan untuk menghancurkan jaringan telekomunikasi dan transportasi Jepang serta

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm.503.

<sup>220</sup> *Ibid.*, hlm.501.

<sup>221</sup> John F. Cady. *Ibid.*, hlm.501.

<sup>222</sup> Sittang Valley merupakan lembah yang memanjang dari *Upper Burma* ke *Lower Burma*. Pada waktu itu, Sittang Valley digunakan sebagai tempat persembunyian tentara AFPFL dan Force 136 untuk melakukan pengintaian terhadap kota Rangoon. *Ibid.*, hlm.501

<sup>223</sup> *Ibid.*, hlm.502.

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm.502.

melemahkan kekuatan angkatan bersenjata Jepang.<sup>225</sup> Dengan begitu, rencana untuk mengalahkan dan mengusir Jepang dari wilayah Burma diharapkan dapat terlaksana.

Sementara itu, pada tanggal 15 Mei 1945, Admiral Mountbatten mengajukan proposal kepada Kepala Staff SACSEA (*Chief of Staff*) di Inggris untuk melakukan restrukturisasi BNA.<sup>226</sup> Restrukturisasi terhadap BNA dilakukan karena BNA adalah ketentaraan bentukan Jepang sedangkan saat ini BNA melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selain itu, restrukturisasi juga dilakukan untuk mempersolid ketentaraan Inggris dengan BNA dalam menghadapi tentara Jepang di peperangan selanjutnya. Sebelum mengajukan proposal tersebut, Admiral Mountbatten terlebih dahulu mengadakan diskusi dengan Aung San mengenai rencana restrukturisasi BNA. Aung San menyetujui rencana Admiral Mountbatten untuk melakukan restrukturisasi BNA. Selanjutnya, setelah menerima proposal yang diajukan oleh Admiral Mounbatten, *Chief Of Staff* di London menyetujui untuk melakukan restrukturisasi terhadap BNA. Pada tanggal 30 Mei 1945 dalam sebuah pertemuan di Delhi yang juga dihadiri oleh Aung San, Admiral Mountbatten mengubah nama BNA menjadi *Patriotic Burmese Force* (PBF).<sup>227</sup> Dalam pertemuan tersebut, Aung San ditetapkan sebagai komandan PBF.

Selain melakukan restrukturisasi terhadap BNA, Inggris menetapkan suatu kebijakan yang akan diberlakukan di Burma setelah Jepang berhasil dikalahkan. Kebijakan tersebut dinamakan *The Burma White Paper*. *White Paper* berisi mengenai

---

<sup>225</sup> *Ibid.*, hlm.502.

<sup>226</sup> Hugh Tinker. *Op.Cit.*, hlm.16.

<sup>227</sup> *Op.Cit.*, hlm.16.

*self-government* dalam pemerintahan Burma dan status Burma yang akan berada dalam *Commonwealth* Inggris. *White Paper* ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1945 oleh Kerajaan Inggris.<sup>228</sup> Dalam *White Paper* dikemukakan bahwa perkembangan politik di Burma akan mengalami kemajuan jika terdapat kerjasama antara elemen-elemen masyarakat di Burma.<sup>229</sup> Untuk mendapatkan situasi yang kondusif dalam memajukan ekonomi, maka diperlukan kondisi dalam negeri yang normal. Oleh karena itu, Inggris berusaha untuk membuat kondisi dalam negeri Burma menjadi kondusif pasca peperangan dengan Jepang. Untuk itulah Inggris menjadikan Burma berada dalam status dominion. Walaupun berada dalam status dominion, Burma tetap akan mempunyai *self-government* yang akan mengatur negara Burma.<sup>230</sup>

Sementara itu, akibat dari serangan-serangan yang dilakukan oleh AFPFL, Force 136, dan *British 14<sup>th</sup> Army* posisi Jepang semakin terancam di Burma. Jepang sendiri tidak dapat berbuat banyak saat terjadi penyerangan terhadap tentara-tentara Jepang di Burma. Hal ini karena Jepang tengah berkonsentrasi terhadap Perang Dunia II sehingga konsentrasi Jepang terbagi dua antara mempertahankan kedudukan Jepang di Burma dan peperangan melawan Sekutu. Keadaan menjadi semakin buruk bagi Jepang setelah kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Dengan demikian, posisi Jepang semakin terdesak di Asia Tenggara. Mengetahui posisi Jepang yang semakin

---

<sup>228</sup> John F.Cady.*Ibid.*,hlm.505.

<sup>229</sup> *Ibid.*,hlm.505.

<sup>230</sup> *Ibid.*,hlm.507.

terancam di Burma, Dr. Ba Maw, selaku perdana menteri pada masa pendudukan Jepang, akhirnya melarikan diri ke Siam.<sup>231</sup>

Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun, penyerahan itu secara resmi terjadi pada tanggal 2 September 1945 dalam perjanjian di atas kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, *Missouri*, di Teluk Tokyo. Pihak Sekutu diwakili oleh Jenderal MacArthur yang bertindak sebagai gubernur militer pada penyerahan tersebut. Akibat dari kekalahan Jepang, negara-negara bekas pendudukan Jepang di Asia Tenggara berada di bawah pengawasan Sekutu. Dalam perjanjian di atas kapal tersebut juga dibahas mengenai dekolonisasi yang dilakukan oleh Sekutu pada negara-negara bekas pendudukan Jepang. Di Burma, ditetapkan bahwa Inggris yang kemudian melakukan dekolonisasi.<sup>232</sup>

Sementara itu, pada bulan September 1945, terjadi restrukturisasi terhadap PBF. Restrukturisasi tersebut dilakukan agar PBF tidak hanya menjadi ketentaraan AFPFL saja tetapi menjadi ketentaraan negara Burma. Pertemuan diadakan di Kandy pada tanggal 9 September 1945 yang dihadiri oleh Admiral Mountbatten, Jenderal Slim, Aung San, Than Tun, dan perwakilan dari anggota PBF untuk membahas mengenai restrukturisasi PBF.<sup>233</sup> Admiral Mountbatten menginginkan agar PBF

---

<sup>231</sup>Dr. Ba Maw melarikan diri ke Siam dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin dipandang sebagai antek Jepang. Dr. Ba Maw berpikir bahwa jika posisi Jepang di Burma semakin terancam, hal tersebut juga akan mempersulit posisi Dr. Ba Maw di Burma. DGE Hall.*Op.Cit.*,hlm.839.

<sup>232</sup> Inggris ditetapkan melakukan dekolonisasi di Burma karena Burma adalah negara bekas jajahan Inggris. Disamping itu, pemerintahan Inggris yang berada di India mempermudah akses ke Burma karena secara geografis negara Burma berdekatan dengan India. *Op.Cit.*,hlm.839.

<sup>233</sup> *Ibid.*,hlm.13.

dibentuk menjadi unit reguler yang dilatih oleh tentara Inggris. Sementara itu, Aung San menginginkan agar BPF terpisah dari unit reguler dan ketentaraan Burma terbentuk secara mandiri tidak tergantung pada ketentaraan Inggris. Melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya disepakati bahwa ketentaraan Burma terpisah dari ketentaraan Inggris. Hasil dari pertemuan tersebut juga disepakati mengenai penggantian nama PBF menjadi *People's Volunteer Organization (PVO)* atau *Pyithu Yebaw Ahpwe* dalam bahasa Burma.<sup>234</sup> PVO itu sendiri merupakan tentara resmi negara Burma –kalau di Indonesia tentara resminya disebut TNI, maka di Burma tentara resminya disebut PVO–. Semua kegiatan atau operasi PVO di bawah kendali Aung San selaku komandan PVO.

#### **IV. 2 Dekolonialisasi Inggris**

Berdasarkan hasil perundingan di Kapal *Missouri*, Inggris melakukan dekolonisasi di Burma.<sup>235</sup> Latar belakang dekolonisasi Inggris dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu semakin berkembangnya AFPFL sebagai organisasi post-kolonialisme. AFPFL menginginkan Burma mencapai kemerdekaan dan pembangunan di Burma harus dilakukan oleh tangan pribumi, bukan oleh pihak asing. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kesepakatan dalam penyelesaian Perang Dunia II yang menyatakan bahwa negara

---

<sup>234</sup> *Op.Cit.*,hlm.17.

<sup>235</sup> Dekolonisasi dapat tercapai dengan pernyataan kemerdekaan, mengintegrasikan diri dengan kekuasaan penguasa atau negara lain, menciptakan status 'asosiasi bebas'. PBB telah menyatakan bahwa dalam proses dekolonisasi tidak ada alternatif selain prinsip kebebasan menentukan (*self-determination*).*Op.Cit.*,hlm.18.

bekas pendudukan Jepang akan mendapatkan kemerdekaan. Jika negara-negara bekas pendudukan Jepang tidak diberi kemerdekaan, Sekutu khawatir bahwa paham komunis akan semakin berkembang di negara-negara tersebut.

Seperti yang telah tercantum dalam *White Paper*, saat Inggris kembali ke Burma tugas utamanya yaitu mengembalikan situasi kembali normal pasca perang dan mempersiapkan kemerdekaan Burma. Inggris kemudian menempatkan gubernur jenderal untuk mengurus persiapan kemerdekaan Burma. Inggris mengirim Gubernur Jenderal Sir Reginald Dorman-Smith sebagai gubernur jenderal yang pertama di Burma. Sir Reginald Dorman-Smith mulai bertugas di Burma pada tanggal 16 Oktober 1945.<sup>236</sup>

Sehari setelah menjabat sebagai Gubernur Jenderal, Sir Reginald Dorman-Smith berpidato di Rangoon City Hall pada tanggal 17 Oktober 1945. Inti dari isi pidatonya adalah sebagai berikut:

My aim will be during the next few month, to form Council which will be predominandy composed of non-official Burmans who command the respect and confidence of the country. It is my intention that these non-official Burmans should be in executive charge of all those subject which the Council of Ministers controlled before the invasion, as these departments return to civil control.(Paul H Kratoska,1995).

Sir Reginald Dorman-Smith menyatakan bahwa tugas utamanya sebagai gubernur jenderal adalah membantu Burma mempersiapkan kemerdekaan.<sup>237</sup> Inggris kemudian menugaskan Sir Reginald Dorman-Smith untuk membuat dewan persiapan kemerdekaan Burma. Sir Reginald Dorman-Smith kemudian merencanakan

---

<sup>236</sup> Paul H Kratoska.*Ibid.*,hlm.13.

<sup>237</sup> *Ibid.*,hlm.14.

membentuk *Executive Council* yang beranggotakan perwakilan AFPFL dan pegawai pemerintahan Inggris. *Executive Council* ini bertugas sebagai dewan yang akan merencanakan konsep ketatanegaraan Burma seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemerintahan.<sup>238</sup>

Pada tanggal 19 Oktober 1945, Sir Reginald Dorman-Smith mengadakan pertemuan dengan AFPFL untuk mendiskusikan pencalonan anggota *Executive Council*.<sup>239</sup> Dalam *Executive Council* terdapat 15 kursi yang ditempati oleh perwakilan Burma dan perwakilan Inggris. AFPFL mengajukan 11 nama yang menempati *Executive Council*.<sup>240</sup> AFPFL membuat pernyataan bahwa tugas *Executive Council* adalah merencanakan ketatanegaraan Burma, untuk itu anggota AFPFL dalam *Executive Council* harus lebih banyak dibandingkan anggota yang berasal dari perwakilan Inggris. Namun, Sir Reginald-Dorman Smith hanya menyetujui lima nama yang diajukan AFPFL untuk menempati *Executive Council*. Pertemuan mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya mengenai jumlah calon yang diajukan. Akhirnya, *Executive Council* terbentuk tanpa ada perwakilan AFPFL yang tergabung dalam keanggotaan *Executive Council*.

Kebuntuan perundingan mengenai *Executive Council* menyebabkan hubungan Sir Reginald Dorman-Smith dengan AFPFL mengalami ketegangan. Inggris melihat bahwa hal tersebut dapat berakibat buruk dalam hubungan dengan Burma. AFPFL

---

<sup>238</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>239</sup> D.G.E Hall. *Op. Cit.*, hlm.19.

<sup>240</sup> *Op. Cit.*, hlm.19.

juga melihat bahwa hal tersebut dapat mempersulit rencana Burma untuk mencapai kemerdekaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Inggris kemudian menggantikan Sir Reginald Dorman-Smith sebagai *Governor of Burma*.

Pada bulan Juni 1946, Sir Reginald Dorman-Smith telah selesai bertugas sebagai *Governor of Burma*. Ia berhenti selain karena diberhentikan oleh pemerintah Inggris juga karena masalah kesehatan sehingga penasehat medisnya menganjurkan agar ia tidak kembali bertugas demi penyembuhan.<sup>241</sup> Sebagai pengganti Sir Reginald Dorman-Smith, Inggris kemudian menetapkan Sir Henry F. Knight dari *Indian Civil Service* sebagai *Governor of Burma*. Ia bertugas sampai selama lebih kurang dua setengah bulan sampai tanggal 31 Juli 1946. Tidak banyak yang ia lakukan pada masa ia menjabat sebagai gubernur.<sup>242</sup> Setelah habis masa jabatannya, Sir Henry F. Knight digantikan oleh Mayor Jenderal Sir Hubert Rance.

Sir Hubert Rance tiba di Rangoon pada tanggal 30 Agustus 1946. Kedatangan Rance di Burma disambut dengan serangkaian pemogokan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Burma. Pada tanggal 5 September, sekitar 3.000-an polisi memulai aksi pemogokan yang dimulai dari pagoda Shwedagon menuju pusat kota Rangoon.<sup>243</sup> Selanjutnya, pemogokan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Burma, yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja pada tanggal

---

<sup>241</sup> Sir Reginald Dorman-Smith didiagnosa terinfeksi amuba disentri dan untuk masa penyembuhan ia harus beristirahat bertugas sebagai *Governor of Burma*. *Op.Cit.*, hlm.74.

<sup>242</sup> Hal ini dikarenakan masa jabatan Knight yang cukup singkat. Sebenarnya penempatan Knight diproyeksikan agar tidak ada kekosongan jabatan sebagai *Governor of Burma* sampai pemerintah Inggris benar-benar menemukan pengganti Dorman-Smith yang sesuai sebagai *Governor of Burma*. Lihat Paul H. Kratoska. *Ibid.*, hlm.19.

<sup>243</sup> *Ibid.*, hlm.537.

15 September 1946, pemogokan yang dilakukan oleh pegawai percetakan pemerintahan pada tanggal 16 September 1946.<sup>244</sup> Pemogokan menyebar sampai ke kota Henzada, Maubin, Twante, dan kota-kota lainnya di Burma.<sup>245</sup> Akhirnya, pemogokan paling besar terjadi pada tanggal 23 September 1946 yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Burma di Rangoon. Serangkaian pemogokan tersebut dimotori oleh AFPFL. Mereka menuntut agar Burma secepatnya mendapatkan kemerdekaan dan menolak pemberlakuan *White Paper*. Pemogokan tersebut juga sebagai pertanda bahwa AFPFL mempunyai pengaruh yang besar pada masyarakat Burma.

Menanggapi reaksi dari masyarakat Burma terhadap penempatan dirinya sebagai *Governor of Burma* yang baru, Rance berusaha untuk menunjukkan niat baiknya terhadap masyarakat Burma. Pada tanggal 2 September 1946, Rance berpidato di Rangoon City Hall.<sup>246</sup> Dalam pidatonya tersebut, ia mengemukakan bahwa kedatangan dirinya di Burma didasari niat baik untuk menyelesaikan dekolonisasi di Burma. Ia menghimbau agar masyarakat Burma dapat bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan dekolonisasi dengan cara damai.<sup>247</sup> Ia juga berjanji untuk membubarkan *Executive Council* yang lama dan segera membentuk *Executive Council* yang baru dengan melibatkan AFPFL.

#### **IV. 3 Serangkaian Perundingan Menuju Kemerdekaan Burma 1 Januari 1948**

---

<sup>244</sup> *Op.Cit.*, hlm.75.

<sup>245</sup> Paul H. Kratoska. *Op.Cit.*, hlm.84.

<sup>246</sup> *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>247</sup> *Op.Cit.*, hlm.20.

Pemerintahan Inggris melakukan perubahan pendekatan terhadap Burma. Rance membubarkan *Executive Council* yang lama dan membentuk *Executive Council* yang baru pada tanggal 26 September 1946. *Executive Council* terdiri atas 9 orang, 6 diantaranya adalah perwakilan AFPFL sedangkan 3 orang lagi berasal dari perwakilan Inggris.<sup>248</sup> Dalam struktur keanggotaan *Executive Council* yang baru, Aung San diangkat menjadi ketua. Diangkatnya Aung San sebagai ketua *Executive Council*, menandakan suatu perkembangan baru ini dalam penyelesaian dekolonisasi. Walaupun begitu, Aung San menyadari bahwa penerimaan jabatan Aung San sebagai ketua *Executive Council* itu bukan berarti selesai semua masalah. Perundingan menuju kemerdekaan masih akan dilalui entah dengan waktu yang singkat atau memerlukan waktu yang panjang. Ia menekankan pentingnya dukungan rakyat Burma bagi dirinya dan AFPFL. Rakyat Burma mendukung sepenuhnya perjuangan AFPFL untuk mencapai kemerdekaan. Namun, tantangan dan rintangan untuk mencapai kemerdekaan tidak berhenti begitu saja. Masalah justru muncul dalam kepengurusan AFPFL itu sendiri.

Dalam kepengurusan AFPFL terdapat perbedaan pandangan dalam mencapai kemerdekaan Burma. Thakin Soe yang beraliran komunis garis keras menolak apapun bentuk perundingan dengan Inggris untuk mencapai kemerdekaan. Ia berprinsip bahwa kemerdekaan Burma harus dicapai melalui "*People War Against Imperialism*" atau revolusi.<sup>249</sup> Aung San tidak menyetujui hal tersebut karena ia

---

<sup>248</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm.21.

<sup>249</sup> Paul H. Kratoska. *Op.Cit.*, hlm.20.

menilai bahwa peperangan akan semakin menambah penderitaan rakyat Burma. Disamping itu, jika Burma mengalami kekalahan dalam perang, akan semakin menyulitkan posisi Burma dalam mencapai kemerdekaan. Menanggapi hal tersebut, Thakin Soe memutuskan untuk keluar dari keanggotaan AFPFL. Setelah ia keluar, Thakin Soe membentuk partai komunis yang baru yaitu “Red Flag”.<sup>250</sup> Partai komunis ini bergerak secara bawah tanah. Than Tun, yang juga beraliran komunis, tidak mengikuti jejak Thakin Soe.<sup>251</sup> Ia tetap berada dalam kepengurusan AFPFL.

Keberadaan Than Tun dalam AFPFL tidak berlangsung lama. Than Tun pun memutuskan untuk keluar dari keanggotaan AFPFL karena ia merasa tersinggung saat Aung San menunjuk Thakin Ba Sein untuk mendampingi saat menghadiri serangkaian perundingan dengan Inggris.<sup>252</sup> Atas alasan tersebut, Than Tun keluar dari AFPFL. Sebagai pengganti Than Tun, Aung San mengangkat Kyaw Nyein yang beraliran sosialis sebagai sekretaris jenderal.<sup>253</sup> Setelah keluar, Than Tun mengumumkan untuk melakukan demonstrasi untuk menentang AFPFL. Menanggapi hal tersebut, pada bulan Oktober 1946 Aung San memutuskan untuk mengeluarkan semua unsur komunis dalam kepengurusan AFPFL.<sup>254</sup> Dalam pidato yang menjelaskan pengeluaran unsur komunis itu, Aung San mengkritik kaum komunis yang berusaha merusak kesatuan dalam negeri, menempatkan kepentingan kelompok di atas kemerdekaan Burma. Thakin Thein Pe –ia juga beraliran komunis

---

<sup>250</sup> *Op.Cit.*,hlm.20.

<sup>251</sup> *Op.Cit.*,hlm.20.

<sup>252</sup> *Op.Cit.*,hlm.22.

<sup>253</sup> *Op.Cit.*,hlm.22.

<sup>254</sup> *Op.Cit.*,hlm.22.

sama seperti Than Tun—, yang juga mundur dari keanggotaan AFPFL membalas dengan mengatakan bahwa Aung San dan anggota AFPFL yang lain telah menjadi antek-antek Inggris.

Sementara itu, di Inggris telah terjadi pergantian perdana menteri. Clement Attlee yang berasal dari Partai Buruh terpilih sebagai perdana menteri Inggris yang baru menggantikan Winston Churchill. Karakteristik Clement Attlee yang lebih humanis dan berempati ternyata membawa perubahan dalam penyelesaian masalah mengenai kemerdekaan Burma. Clement Attlee menunjukkan niat baiknya kepada Burma untuk mengadakan penyelesaian secara damai. Niat baik ini ia implementasikan ke dalam bentuk perundingan yang diadakan secara damai dengan AFPFL guna membahas mengenai kemerdekaan Burma.

Sementara itu, perundingan dengan Inggris untuk mencapai kemerdekaan Burma terus dilakukan. Pada tanggal 20 Desember 1946, Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee, mengundang AFPFL ke London guna membicarakan kemerdekaan Burma. Undangan tersebut diterima AFPFL pada tanggal 26 Desember 1946. Aung San kemudian berangkat ke London pada tanggal 1 Januari 1947 untuk memenuhi undangan tersebut. Delegasi AFPFL yang bertolak ke London terdiri dari Aung San, Thakin Mya, Ba Sein, U Tin Tut, U Ba Pe, dan U Saw.

Sebelum tiba di London, rombongan AFPFL terlebih dahulu singgah ke India. Dalam konferensi pers ketika singgah di Delhi, Aung San menyatakan bahwa delegasinya menghendaki kemerdekaan penuh, tidak ada keinginan sama sekali untuk

status dominion. Pada dasarnya, Aung San pun ingin memperjuangkan kemerdekaan Burma secara damai karena ia berpendapat bahwa perlawanan bersenjata akan semakin menambah penderitaan rakyat Burma. Walaupun begitu, sesungguhnya Aung San dan AFPFL telah membuat persiapan untuk mengumpulkan senjata dan bersiap melakukan perlawanan jika perundingan dengan pemerintah Inggris mengenai kemerdekaan Burma mengalami kegagalan.

Delegasi AFPFL tiba di London pada tanggal 9 Januari 1947.<sup>255</sup> Perundingan antara AFPFL dengan Inggris dimulai dari tanggal 13 Januari 1947.<sup>256</sup> Perundingan dengan Inggris berjalan lancar dan hampir tidak ada halangan yang berarti. Akhirnya, perundingan dengan Inggris tercapai pada tanggal 27 Januari 1947. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama Perundingan Attlee-Aung San atau *The Anglo-Burmese Pact* 1947.<sup>257</sup> Dalam perundingan antara Burma yang diwakili AFPFL dengan Inggris menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

The Anglo-Burmese Pact 1947/Attlee-Aung San Agreement

1. Constituent Assembly consisting only of Burma nationals will be elected in April of this years
2. With the elections to the Constituent Assembly completed, the Governor will nominated one hundred members for the Legislatif Council including representative of all minorities
3. The Interim Government, with about the same authority as the present Interim Government in India, will conduct the affairs of state under the emergency provision of the Act of 1935 until the new constitution come into force
4. Certain mattersnow formally reserved by the Governor of Burma – for example, matters concerning defense and foreign relation– will be brought before Executive Council which is to be fully associated with the disposition of such matters

---

<sup>255</sup> *Op.Cit.*,hlm.23.

<sup>256</sup> *Op.Cit.*,hlm.23.

<sup>257</sup> Hugh Tinker.*Op.Cit.*,hlm.23.

5. Arrangements are in the making whereby Burma will be represented abroad; these include the immediate appointment of a Burmese high commissioner in London
6. Whatever action is to be taken with reference to the people of the frontier areas it is to be taken with reference to the people of the frontier areas it is to be in accordance with the desire of the people within these areas. Representative of the frontier people –the Karens, Kachins, Chins, Shans, Lahus, and others– are to express their views at a forthcoming conference relative to the form of association they will have with the new government of Burma
7. Burma will give the power to decide whether or not she prefers to remain within the British Commonwealth of Nation.

(Sumber: Paul H. Kratoska, 1995. hlm.63)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Attlee-Aung San, maka dalam waktu empat bulan kemudian, Burma menyelenggarakan pemilihan untuk memilih *Constituent Assembly*. *Constituent Assembly* inilah yang nantinya memutuskan apakah Burma memilih status dominion dibawah *Commonwealth* Inggris atau lebih memilih *self-government*. Akan tetapi, tidak semua anggota AFPFL menyetujui isi dari perjanjian Attlee-Aug San. Dua orang anggota delegasi Burma menolak menandatangani persetujuan itu, yaitu U Saw dan Ba Shein. Mereka tidak menyetujui adanya pemilihan yang diadakan untuk memilih *Constituent Assembly*.<sup>258</sup> U Saw dan Ba Shein menilai bahwa Burma lebih baik tetap berada dalam status dominion Inggris daripada harus merdeka sendiri tanpa ada ikatan dengan Inggris.<sup>259</sup> Setelah tiba di Burma, U Saw dan Ba Shein bergabung dengan Dr. Ba Maw dan Paw Tun membentuk *Democratic Nationalist Opposition Front* (DNOF).<sup>260</sup> Front tersebut merupakan front oposisi nasional yang menjadi oposisi AFPFL. DNOF menuduh

---

<sup>258</sup> *Op.Cit.*, hlm.25.

<sup>259</sup> *Op.Cit.*, hlm.25.

<sup>260</sup> *Op.Cit.*, hlm.25.

Aung San telah menyeberang ke pihak imperialis agar dapat memperoleh jabatan saat Burma mencapai kemerdekaan.

Implementasi dari Perjanjian Attlee-Aung San poin nomor 6 adalah penekanan pentingnya kehadiran dan kontribusi etnis minoritas terhadap pemerintahan Burma. Untuk itu, AFPFL perlu melakukan rekonsiliasi terhadap etnis-etnis minoritas. Clement Attlee pun tidak ingin jika delegasi AFPFL hanya mewakili etnis Burma saja, tetapi juga harus melibatkan etnis-etnis yang lain seperti Kachin, Chin, Shan, dll. Oleh karena itu, Attlee pun meminta Aung San kembali ke Burma bernegosiasi dengan pemimpin di kawasan perbatasan.

Para pemimpin etnis minoritas telah terlebih dahulu mengadakan pertemuan internal sebelum Aung San mengadakan pertemuan dengan mereka. Para pemimpin lokal itu, khususnya yang berada di area perbatasan, telah mengadakan konferensi pertama di bulan November 1946 di kota Panglong. Konferensi itu bertujuan mengambil langkah-langkah yang perlu ditempuh bagi negara-negara bagian perbatasan atas keluarnya Jepang dari keseluruhan wilayah Burma. Pembahasan lainnya adalah mengenai rencana pemberian kemerdekaan dan status sebagai negara persemakmuran Inggris. Begitu pula halnya rencana pemberian kemerdekaan kepada Burma, yang dianggap sebagai ancaman kedaulatan dan kekuasaan masing-masing pemimpin etnis di area perbatasan.

Saat Aung San kembali ke Burma, ia mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok etnis di perbatasan. Hal ini ia lakukan guna memperoleh

dukungan mengenai rencana kemerdekaan penuh Burma dari Inggris.<sup>261</sup> Jika etnis-etnis minoritas bersedia mendukung AFPFL, maka posisi tawar AFPFL akan semakin kuat dalam perundingan dengan Inggris. Aung San hadir memenuhi undangan konferensi kedua dari para pemimpin perbatasan pada bulan Februari 1947.

Penandatanganan kesepakatan Panglong pada tanggal 12 Februari 1947 merupakan tonggak pembentukan kesatuan negara Burma (*Union of Burma*). Hal tersebut karena etnis-etnis minoritas bersedia untuk mendukung AFPFL dan bergabung dengan negara kesatuan Burma. Dalam perjanjian Panglong, AFPFL diwakili oleh Aung San, Tin Tut, Bo Khin Maung Gale.<sup>262</sup> Sedangkan yang bertindak sebagai ketua adalah Dr. Rens-Williams yang berasal dari Inggris.<sup>263</sup> Isi Perjanjian Panglong berisi 9 poin penting<sup>264</sup>, salah satunya yaitu dibentuk *Supreme Council of the United Hill People* sebagai dewan yang merepresentasikan *Frontier Area*. Dalam Perjanjian Panglong juga disepakati bahwa para pemimpin etnis perbatasan bersedia berada dalam kesatuan pemerintah Burma yang merdeka. Selanjutnya, dalam sepuluh tahun kedepan, etnis-etnis minoritas akan memperoleh otonomi penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri dalam negara kesatuan Burma. Dalam Perjanjian Panglong disepakati bahwa Sao Sam Htun menjadi konsuler pertama *Frontier Area*, Sima Hsinwa Nawng menjadi deputi untuk etnis Karen, dan U Kom Ko Hau menjadi

---

<sup>261</sup> *Op.Cit.*, hlm.24.

<sup>262</sup> *Op.Cit.*, hlm.24.

<sup>263</sup> *Op.Cit.*, hlm.24.

<sup>264</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai isi dari Perjanjian Panglong, Lihat Paul H.Kratoska. *Ibid.*, hlm.69.

deputi untuk etnis Chin.<sup>265</sup> Setelah penandatanganan Perjanjian Panglong, Aung San menyampaikan pidato yang isinya adalah sebagai berikut,

“We can confidently assert here that so far as our knowledge of our country goes, there should be no insuperable difficulties in the way of a unified provided all races are given full freedom and the opportunity to meet together and to work without the interfere of outside interests. So far as we are concerned, we stand for full freedom of all the races of our country, including those so-called Karenni states, and we hold strongly the view that no such race and no regime in our country should be denied the fruits of the freedom that must shortly be achieved by our country and our people”. (Martin Smith,1999.hlm.78).

Dalam pidato tersebut Aung San menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan antar etnis di Burma guna membangun sebuah negara. Di samping itu, Aung San tidak menginginkan adanya intervensi dari negara lain dalam urusan pemerintahan dan pembangunan negara Burma.

Setelah terjadi penandatanganan Perjanjian Panglong, pada bulan April 1947 diadakan pemilihan untuk *Constituent Assembly*.<sup>266</sup> Partai atau organisasi yang mengikuti pemilihan *Constituent Assembly* yaitu AFPFL, Reg Flag Communist, dan Independence-First Alliance. Dalam pemilihan tersebut, AFPFL mendominasi perolehan kursi.<sup>267</sup> Dari 180 kursi, AFPFL memperoleh 170 kursi sedangkan komunis hanya menempati 10 kursi.<sup>268</sup> Dalam pemilihan tersebut, koalisi Ba Maw-U Saw-Ba Shein berusaha untuk memboikot pemilihan dengan cara melakukan huru-hara saat pemilihan sedang terjadi. Namun, usaha tersebut digagalkan oleh PVO yang bersiaga untuk mengamankan pemilihan *Constituent Assembly*.

---

<sup>265</sup> *Ibid.*,hlm.544.

<sup>266</sup> *Ibid.*,hlm.551.

<sup>267</sup> *Ibid.*,hlm.551.

<sup>268</sup> *Ibid.*,hlm.551.

Setelah berlangsung pemilihan *Constituent Assembly*, terjadi suatu peristiwa yang menjadi catatan hitam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Burma. Aung San yang menjadi figur penting dalam persiapan kemerdekaan Burma dibunuh oleh rival politiknya yang bernama U Saw. Pada tanggal 19 Juli 1947 dalam suatu rapat *Executive Council*, Aung San bersama tujuh anggota senior pemerintahan, yaitu Thakin Mya, Deedok Ba Choe, Mahn Ba Khaing, Sawbwa Sam Htun –yang berasal dari etnis Karen–, U Ohn Maung, Abdul Razak, U Ba Win, dan seorang ajudan muda yang bernama Ko Htwe dibunuh oleh orang-orang berseragam bersenjata senapan mesin.<sup>269</sup> Alasan pembunuhan yang dilakukan oleh U Saw yaitu bahwa ia berbeda pendapat dengan Aung San mengenai status Burma pasca kemerdekaan. U Saw menginginkan bahwa setelah merdeka, Burma berada di bawah *dominion status* dari Inggris karena sebagai negara yang baru merdeka, Burma tentu saja membutuhkan banyak tenaga ahli dan modal untuk membangun negara. Sedangkan Aung San berpendapat sebaliknya, ia menilai jika Burma berada di bawah *dominion status*, maka dikhawatirkan sewaktu-waktu Inggris dapat berkuasa lagi di Burma. Xenophobia inilah yang terjadi pada Aung San. Atas pembunuhan yang U Saw lakukan terhadap Aung San, ia dan pengikutnya ditahan di Insein Jail pada tanggal 30 Desember 1947.<sup>270</sup> Setelah melalui proses persidangan, U Saw dan pengikutnya dihukum gantung pada tanggal 8 Mei 1948.<sup>271</sup>

---

<sup>269</sup> Frank N Trager.*Ibid.*,hlm.89.

<sup>270</sup> Hugh Tinker.*Op.Cit.*,hlm.27.

<sup>271</sup> *Op.Cit.*,hlm.27.

Walaupun Aung San telah meninggal, perjuangan mencapai kemerdekaan tidak berhenti begitu saja. U Nu, yang pada waktu itu adalah wakil ketua AFPFL, terpilih sebagai pengganti Aung San. Pencalonan U Nu sebagai pengganti Aung San diusulkan oleh Rance. Ia menilai bahwa U Nu adalah sosok yang paling tepat menggantikan Aung San karena dari segi pemikiran U Nu tidak jauh berbeda dengan Aung San. Ia juga orang yang kooperatif serta memiliki kredibilitas sebagai seorang pemimpin. Menanggapi usulan Rance, Dewan Eksekutif AFPFL kemudian mengadakan rapat guna membahas pemilihan U Nu sebagai ketua AFPFL. Hasil dari pertemuan tersebut, mayoritas anggota AFPFL setuju bahwa U Nu dipilih sebagai pemimpin Aung San. Dalam pertemuan tersebut juga ditetapkan bahwa jika Burma memperoleh kemerdekaan, maka U Nu akan menjabat sebagai Perdana Menteri Burma. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Eksekutif AFPFL mengumumkan 6 resolusi yang menjadi acuan kebijakan mereka.

1. The new government should take steps to secure membership in the United Nation
2. Should take immediate steps for entering into diplomatic relations with foreign countries
3. The project boards should be discontinued
4. The April elections should be for a constituent assembly
5. Foreign troops should be replaced by Burmese troops; and
6. The rumor that certain district of Burma proper were to be incorporated into Kachin state should be investigated and, if true, resisted.(Paul H. Kratoska,1995.hlm.86)

Inti dari resolusi yang ditetapkan oleh AFPFL yaitu bahwa setelah Burma merdeka, maka Burma akan menjadi negara yang berdaulat. Untuk itu, Burma akan mengikuti

keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bebas melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain, dan menggantikan tentara Inggris dengan tentara Burma.

Setelah U Nu terpilih sebagai pemimpin AFPFL, ia mempunyai tugas baru, yaitu membuat rancangan kenegaraan dan meneruskan perundingan dengan Inggris dalam membahas kemerdekaan Burma. Pada pertengahan bulan September 1947, *Constituent Assembly* terbentuk di bawah kepemimpinan U Nu. Bo Let Ya menjabat sebagai wakil U Nu. *Constituent Assembly* mengadakan pertemuan untuk merumuskan bentuk kenegaraan Burma. Pertemuan dihadiri oleh U Nu, Tin Tut, Sir Ba U, Justice E Maung, Justice Kyaw Myint dan Chan Htoon.<sup>272</sup> U Chan Htoon mengusulkan agar undang-undang dibagi dalam dua model yaitu '*high ideal*' dalam keadilan sosial dan '*particular provision*' dalam aspek pemerintahan.<sup>273</sup> Hal tersebut dimulai dari deklarasi mengenai hak asasi manusia, pernyataan mengenai hubungan antara negara dengan para pekerja dan petani.<sup>274</sup> U Chan Htoon juga mengusulkan mengenai badan legislatif yang bersifat bikameral yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu *upper house* atau *Chamber of Nationalities* yang diperuntukkan bagi etnis-etnis minoritas.<sup>275</sup> Bagian yang kedua yaitu *lower house* atau *Chamber of Deputy* yang berisikan wakil-wakil rakyat terpilih.<sup>276</sup> Perundang-undangan juga harus menjamin hak-hak etnis-etnis minoritas seperti etnis Shan,

---

<sup>272</sup> *Op. Cit.*, hlm.29.

<sup>273</sup> *Op. Cit.*, hlm.29.

<sup>274</sup> *Op. Cit.*, hlm.29.

<sup>275</sup> *Op. Cit.*, hlm.30.

<sup>276</sup> Dalam setiap 100.000 orang akan terpilih 1 orang yang menempati kursi di Chamber of Deputy. Jadi satu orang mewakili 100.000 orang. Lihat Hugh Tinker. *Op. Cit.*, hlm.30.

Kachin, dan Karen.<sup>277</sup> Setiap etnis mempunyai pemerintahan otonom yang bertanggung jawab pada pemerintahan pusat. Setelah melalui diskusi, akhirnya *Constituent Assembly* memutuskan bentuk kenegaraan Burma.

*Constituent Assembly* mengadopsi beberapa model ketatanegaraan dari negara-negara lain. Sebagai contoh, *Constituent Assembly* mengadopsi sistem ketatanegaraan Perancis, yaitu presiden sebagai kepala negara dipilih berdasarkan suara terbanyak oleh parlemen.<sup>278</sup> Masa jabatan presiden dibatasi selama lima tahun. Dari sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, diadopsi mengenai pernyataan mengenai hak asasi manusia, pembentukan peradilan yang independen dalam menetapkan undang-undang, dan sistem federal di bawah komponen *Union of Burma* yang direpresentasikan pada parlemen.<sup>279</sup>

Setelah memutuskan bentuk kenegaraan Burma, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh *Constituent Assembly* yaitu mengadakan perundingan dengan Inggris untuk membicarakan mengenai waktu kemerdekaan Burma dan status Burma setelah merdeka. Rencana untuk memerdekakan Burma dan melepaskan Burma dari status *British Commonwealth* dicapai dengan cara negosiasi melalui dua perundingan dengan Inggris. Perundingan yang pertama terjadi pada tanggal 29 Agustus 1947 di Rangoon. Dalam perundingan tersebut, wakil AFPFL terdiri dari Bo Let Ya dan U Nu sedangkan wakil dari Inggris yaitu John W. Freeman. Adapun hasil dari perundingan tersebut yaitu;

---

<sup>277</sup> *Op.Cit.*,hlm.30.

<sup>278</sup> John F Cady.*Ibid.*,hlm.560.

<sup>279</sup> *Ibid.*,hlm.560.

- 1.No armed force mission would be received from outside the British Commonwealth
2. Commonwealth naval vessels and air force planes would be accorded entry into Burma at prescribed points upon notification from time to time
3. Any Commonwealth forces undertaking by agreement to participate in Burma's defence would be afforded all reasonable assistance including facilities of access and entry (John F. Cady,1960.hlm.568.)

Dalam perundingan tersebut juga disepakati bantuan dana dari Inggris sebesar £40.000 pertahun untuk biaya pemeliharaan bandar udara Akyab dan Mergui.<sup>280</sup> Di samping itu, Inggris juga menyetujui permintaan Burma untuk melatih tentara Burma –angkatan laut, militer, dan angkatan udara–dalam waktu tiga tahun.

Perundingan yang paling penting antara Burma dengan Inggris terjadi pada tanggal 17 Oktober 1947.<sup>281</sup> Perundingan tersebut dilakukan di London yang dihadiri oleh U Nu sebagai wakil dari Burma sedangkan wakil dari Inggris yaitu Clement Attlee. Dalam perundingan tersebut, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Burma dan menyetujui draft kenegaraan Burma yang sebelumnya telah dirancang oleh *Constituent Assembly*. Disepakati pula bahwa Burma akan merdeka pada bulan Januari 1948.<sup>282</sup> Dengan adanya kemerdekaan Burma, maka Burma menjadi negara yang berdaulat penuh atas segala kondisi dalam negeri Burma. Walaupun Burma tidak lagi berada dalam status *British Commonwealth*, akan tetapi kedua negara sepakat untuk menjaga hubungan baik. Perundingan final antara Burma dengan Inggris tersebut dikenal dengan *Attlee–U Nu Agreement* 1947. Perundingan tersebut

---

<sup>280</sup> *Ibid.*,hlm.567.

<sup>281</sup> *Ibid.*,hlm.568.

<sup>282</sup> *Ibid.*,hlm.579.

disahkan oleh Parlemen Inggris pada tanggal 10 Desember 1947 melalui *Burma Independence Act*.<sup>283</sup>

Setelah melakukan perundingan, U Nu berpidato mengenai jalannya perundingan dengan Inggris. Isi pidato tersebut yaitu:

I want to make a public acknowledgment of the great wisdom and vision of the British Labour Government. No one can deny that the British Government are in a position to drive a hard bargain with us. Yet throughout the negotiations never had I met with any instance of hardheartedness. From beginning to end, British Government were at pains to win our goodwill rather than our pleasure. (Hugh Tinker, 1967. hlm. 32)

Dalam pidatonya tersebut, U Nu mengucapkan terima kasih atas sikap Inggris yang sangat kooperatif terhadap penyelesaian dekolonisasi di Burma. Dengan sikap kooperatif dan niat baik yang dilakukan oleh Inggris, akhirnya Burma bisa mendapatkan kemerdekaan tanpa melalui proses angkat senjata. Dengan begitu, cita-cita Aung San yang menginginkan Burma mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah dapat tercapai.

Setelah melakukan kunjungan ke London, rombongan U Nu kembali ke Burma untuk melakukan persiapan kemerdekaan. Sekembalinya di Burma, U Nu mencoba untuk melakukan pendekatan dengan komunis agar mereka bersatu ke dalam *Union of Burma*.<sup>284</sup> Namun, tindakan yang persuasif yang dilakukan oleh U Nu tidak mendapat sambutan yang baik oleh komunis. Mereka malah membuat kampanye yang isinya mengenai perlawanan terhadap hasil perundingan Attlee-U

---

<sup>283</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>284</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm. 32.

Nu.<sup>285</sup> Mereka menilai bahwa U Nu dan anggota AFPFL telah menjadi anak buah imperialis. Menanggapi reaksi yang tidak bersahabat dari komunis, U Nu akhirnya menghentikan usaha pendekatan dengan komunis. Akhirnya, pada tanggal 17 November 1947, AFPFL secara resmi menghentikan usaha untuk membawa komunis kembali ke dalam AFPFL.<sup>286</sup>

Walaupun tanpa ada dukungan dari unsur komunis, U Nu tetap yakin bahwa kemerdekaan Burma dapat tercapai. Ia menyatakan bahwa hampir semua lapisan masyarakat Burma mendukung kemerdekaan Burma. Hal ini terbukti dari banyaknya dukungan yang didapat AFPFL dari masyarakat Burma. Dengan adanya dukungan dan perhatian tersebut, maka AFPFL semakin memantapkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Burma.

Pada tanggal 4 Januari 1948, Burma mencapai kemerdekaan dengan nama resmi *Union of Burma*. Bendera AFPFL yang kemudian menjadi bendera resmi dikibarkan di kantor pemerintahan di Rangoon.<sup>287</sup> Sebagai presiden *Union of Burma* terpilih Sao Shwe Thaik, yang berasal dari etnis Shan dari Yawnghwe. Kabinet pertama ini disebut *Provisional Government*.<sup>288</sup> Kabinet ini terdiri dari beberapa kementerian yaitu Bo Let Ya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan; Kyaw Nyein sebagai Menteri Perumahan dan Perundang-undangan; Tin Tut sebagai

---

<sup>285</sup> *Ibid.*, hlm.32.

<sup>286</sup> *Ibid.*, hlm.32.

<sup>287</sup> Bentuk bendera AFPFL yaitu persegi panjang berwarna merah dengan bintang besar berwarna biru gelap yang dikelilingi lima bintang berwarna putih yang melambangkan persatuan dalam *Union of Burma*. *Ibid.*, hlm.32.

<sup>288</sup> Frank N Trager. *Op.Cit.*, hlm.90.

Menteri Luar Negeri; Henzada Mya sebagai Menteri Perencanaan Nasional; Pyawbwe Mya sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi; Saw San Po Thin sebagai Menteri Pendidikan; Aung Zan Wai sebagai Menteri Pelayanan Sosial; Thakin Tin sebagai Menteri Pertanian; Bo Po Kun sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Rehabilitasi; Mahn Win Maung sebagai Menteri Perindustrian dan Pekerja; Ba Hian sebagai Menteri Keuangan dan Pendapatan; Ko Ko Gyi sebagai Menteri Perdagangan; Sao Hkun Hkio menjabat sebagai konsuler untuk *Frontier Area* Shan; Vum Ko Hau menjabat sebagai konsuler untuk *Frontier Area* Chin; Sama Duwa Sinwa menjabat sebagai konsuler untuk *Frontier Area* Kachin; dan, Lun Baw menjabat sebagai Komisi Pelayanan Sosial.<sup>289</sup> Dari susunan kabinet dalam *Provisional Government* dapat dilihat bahwa orang-orang dari etnis Shan, Kachin, dan Chin diikutsertakan dalam pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa *Union Of Burma* mencakup representasi etnis minoritas sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Panglong 1947. Dengan merdekanya Burma, maka tujuan utama AFPFL dapat tercapai yaitu kemerdekaan Burma dan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang dalam negeri.

Sebagai gambaran umum, AFPFL kemudian berkembang menjadi sebuah partai politik yang berpengaruh cukup besar di Burma sampai tahun 1962. Pada tahun 1962, Ne Win seorang perwira militer melakukan kudeta terhadap kepemimpinan U Nu karena ia menganggap bahwa setelah dipimpin oleh U Nu, Burma tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Setelah Ne Win berkuasa, ia menerapkan

---

<sup>289</sup> *Op.Cit.*, hlm.90.

sistem satu partai atau partai tunggal dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu, semua partai politik termasuk AFPFL dihilangkan. Ne Win menganggap bahwa banyaknya partai politik akan mengacaukan pemerintahan karena partai politik cenderung untuk memperebutkan kekuasaan. Walaupun AFPFL hanya bertahan sampai tahun 1962, namun perjuangan AFPFL dalam mencapai kemerdekaan di Burma mempunyai catatan tersendiri dalam sejarah Burma karena AFPFL merupakan organisasi yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Burma.

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

Kolonialisme Inggris (1886-1942) di Burma berdampak pada munculnya pergerakan nasional. Pada awalnya, pergerakan nasional dipelopori oleh golongan *pongyi* (biksu Budha) yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Inggris menjadikan posisi para *pongyis* terpinggirkan dalam masyarakat Burma. Para *pongyis* kemudian mendirikan organisasi *Young Men's Buddhist Association* (YMBA) yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan biksu pada masyarakat Burma. Tak dapat dipungkiri bahwa kolonialisme Inggris telah menumbuhkan bibit nasionalisme bagi masyarakat Burma.

Pada masa pendudukan Jepang di Burma (1942-1945) pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan semakin berkembang. Dampak dari pendudukan